
UMKM DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN DAN MANAJEMEN

Risa Nur Aidah¹, Gading S. Pinandhito², Lorenzia Ida Ayu³, Lodis Ramadhan⁴, Andra Tiara⁵

Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jendral Soedirman,
Indonesia¹²³⁴⁵

risanuraidah268@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 29, 2023

Accepted July 06, 2023

Kata Kunci:

UMKM; KUBPringmas;
Manajemen; Keuangan

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis UMKM batik Banyumas dalam perspektif keuangan dan manajemen untuk mendapat gambaran yang komprehensif dari problematika yang dilihat dari aspek keuangan dan manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendapatkan hasil yang memadai terkait penerapan aspek manajemen dan keuangan dalam pelaku usaha yang tergabung dalam KUB tersebut. Adapun metode pengambilan data menggunakan metode survey terhadap anggota yang terdata dalam Kelompok Usaha Bersama Batik Pringmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pelaku usaha belum menerapkan manajemen dan keuangan dengan baik, permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya SDM yang memadai dan berbagai permasalahan lainnya.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Risa Nur Aidah,
Magister Sains Akuntansi
Fakultas Ekonom dan Bisnis
Universitas Jendral Soedirman
Email : Risanuraidah268@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Batik merupakan kesenian asli Indonesia yang sudah dikenal dunia dan sudah diakui UNESCO sejak tahun 2009 sebagai budaya tak benda warisan manusia. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri karena batik bisa menjadi identitas suatu bangsa yang telah diakui dunia (Taufiqoh et al., 2018). Dalam perkembangannya setiap daerah memiliki ciri sendiri yang dijewantahkan dalam karya seni batik. Tentu menjadi keunikan tersendiri karena kita dapat melihat berbagai macam pola serta keunikan yang tersedia. Selain itu pola yang beragam mencerminkan makna dan filosofi yang mendalam (Sariagri.id, 2021).

Selain dapat dibanggakan sebagai karya seni, batik juga menjadi salah satu industri kriya yang menjadi tumpuan industri skala mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut dapat terlihat dari angka

devisa yang disumbangkan pada semester I tahun 2022 sebesar 27,42 T dan pada semester I tahun 2021 sebesar 46,24T. Dengan hal itu juga batik menjadi industri yang turut membantu dalam mensejahterakan UMKM di Indonesia (Kemenparekraf, 2022).

UMKM terbukti dapat menjadi pilar ekonomi Indonesia, terlihat dari berbagai krisis yang telah dilalui dan UMKM terbukti dapat bertahan. Bersamaan dengan itu tentu UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja dan menyumbang dalam pengurangan angka pengangguran. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal (Sarfiyah et al., 2019).

Batik sebagai salah satu sektor kerajinan dalam UMKM tentu berpotensi memiliki peluang ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan berbagai karakteristik unik yang dimilikinya. Selain itu UMKM juga terbukti dalam pengurangan angka pengangguran dan memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari Kumparan Bisnis menurut Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Pertama pelaku UMKM rata-rata belum memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan akses terhadap pasar. Kedua sulitnya akses permodalan UMKM mengingat banyaknya berkas pelengkap yang perlu dilampirkan dan proses yang terlalu berbelit. Terakhir Tirta membeberkan bahwa UMKM memiliki SDM yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang rendah sehingga berimplikasi pada sulitnya pemasaran, kurang inovatif, sulit mengurus perizinan dan belum mampu membuat laporan keuangan (Putra, 2022).

Berdasarkan penjelasan di paragraph sebelumnya UMKM memiliki berbagai problematikanya tersendiri, seperti kurangnya sumber daya manusia yang ahli hingga kurangnya aspek dalam manajerial hingga keuangan. Maka dari itu peneliti menganalisis UMKM batik Banyumas dalam perspektif keuangan dan manajemen untuk mendapat gambaran yang komprehensif dari problematika yang dilihat dari aspek keuangan dan manajemen.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil di Indonesia diatur dalam UU 20/2008. Hukum membagi usaha kecil menjadi tiga kategori: mikro, kecil dan menengah, berdasarkan aset dan omzetnya. Menurut UU, bisnis kecil mengacu pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan yang tidak dimiliki, dikendalikan, langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha menengah atau besar, atau anak perusahaan atau cabang perusahaan. Bisnis menengah mengacu pada kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. Sementara ukuran perusahaan sedang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, tidak dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil atau perusahaan besar. Berikut tabel kriteria usaha berdasarkan UU.

Tabel 1.

Kriteria UMKM Menurut UU No 20 tahun 2008

NO	Kategori	Kriteria	
		Aset	Perputaran
1	Usaha Mikro	0 – 50 Jt	0 – 300 Jt
2	Usaha Kecil	50 – 500 Jt	300 – 2,5 M
3	Usaha Menengah	500 – 10 M	2,5 – 5M

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya (iai.global.or.id).

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut (iai.global.or.id).

Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan seperangkat aturan kerja yang tertulis dan didokumentasikan mengenai operasional administrasi perusahaan, kapan, bagaimana, apa yang harus dilakukan dan siapa yang melakukan (Arnani P, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki SOP yang jelas dapat beroperasi lebih baik karena semua telah diatur terkait pembagian tugas dan tanggungjawab setiap elemen yang ada di perusahaan. Tentu manajemen yang baik dapat memberikan keberlangsungan juga kepada perusahaan. Adapun tujuan dan fungsi SOP menurut Arnani. P (2016) adalah sebagai berikut;

1. Konsistensi dalam suatu prosedur kerja
2. Proses kontroling mudah.
3. Mengetahui peran dan fungsi.
4. Memberikan keterangan dan kejelasan.
5. Memberikan keterangan tentang dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
6. Melindungi dari kesalahan administrative.
7. Menghindari kesalahan dan inefisiensi.
8. Sebagai pedoman pekerjaan rutin.
9. Identifikasi pola kerja.
10. Mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis dan konsisten agar mudah dipahami.
11. Memudahkan proses pemberian tugas serta tanggungjawab.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian dengan mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan Kualitatif merupakan penelitian yang memberikan hasil penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial serta pengetahuan merupakan sesuatu yang legitimate (Moleong, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi lengkap tentang” UMKM dalam Perspektif Keuangan dan Manajemen”

Metode pengambilan data menggunakan Teknik wawancara. Adapun Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal yang memiliki tujuan demi memperoleh informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula, ciri utama dari teknik ini adalah adanya interaksi antara peneliti dan subjek penelitian (Zuriah, 2007). Maka dari itu peneliti memutuskan untuk datang langsung pada acara yang diselenggarakan oleh subjek penelitian dan mengambil data terkait yang diperlukan dalam penelitian. Pendekatan ini tentu diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait aspek keuangan dan manajemen UMKM batik banyumas.

Mengingat pelaku UMKM yang tersebar dan tidak terdata dengan jelas pengrajin batik di Kab. Banyumas, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling, Menurut (Sugiyono, 2016), Sampling Insidental / Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil sampel dalam pertemuan “Kelompok Usaha Bersama Batik Pringmas” yang dilaksanakan pada tanggal 27 maret 2023.

3. HASIL DAN DISKUSI

Profil Kelompok Usaha Bersama Batik Pringmas

Kelompok Usaha Bersama Batik Pringmas merupakan suatu wadah bagi para pengrajin batik di Desa Papringan yang terletak di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kelompok usaha ini didirikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto pada tahun 2013. Bank Indonesia berperan aktif dalam memberikan berbagai pelatihan kepada anggota KUB yang memiliki jumlah anggota sebanyak 25 pengrajin batik. Pelatihan tersebut mulai dari pelatihan kewirausahaan, Produksi hingga K3. Selain dari BI, Unsoed pun turut memberikan beberapa pelatihan seperti pelatihan manajemen dan keuangan.

Berbagai pelatihan yang telah dilaksanakan memberikan dampak dan manfaat bagi anggota kelompok usaha bersama tersebut. Pelatihan yang diikuti memberikan pengetahuan yang dapat menunjang dalam pengelolaan usaha. Adapun pengetahuan yang menunjang adalah sebagai berikut;

1. Keahlian menggunakan warna sintetik.
2. Keahlian menggunakan warna alam.
3. Keahlian membatik ecoprint, jumputan dan smock.
4. Menjahit.
5. Keahlian Desain.

Selain keahlian yang didapat dari berbagai pelatihan yang diikuti, beberapa anggota dari kelompok usaha ini juga telah mendapat keahlian yang diberikan secara turun temurun dari keluarga. Seperti yang diketahui bahwa desa papringan secara mendasar bahkan telah dikenal dengan kesenian batik Banyumasan bahkan sebelum BI mendirikan Kelompok Usaha Batik Pringmas pada tahun 2013.

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebar peneliti mendapat 18 responden dari total 25 anggota KUB. Adapun sisa anggota yang tidak menjawab kuisioner dikarenakan tidak hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Hasil yang didapat memberikan pemahaman yang terkait profil anggota, pengetahuan yang menunjang dalam bisnis, omzet yang didapat, perilaku anggota terhadap keuangan dan manajemen.

Berdasar hasil yang didapat kami mengelompokkan kriteria berdasarkan omset menurut UU No. 20 tahun 2008. Adapun pengelompokannya tercermin dalam tabel 2.

Tabel 2
Kriteria UMKM KUB Pringmas

No.	Kriteria	Hasil
1.	Mikro	15
2.	Kecil	1
3.	Menengah	0
4.	Tidak Menjawab	2
Total		18

Rata-rata pelaku usaha batik yang tergabung dalam KUB Pringmas berada di kriteria mikro dengan omset dalam satu tahun kurang dari Rp. 300.000.000,-. Selain itu terdapat satu usaha yang memiliki skala kecil yaitu KUB Pringmas itu sendiri. Sementara untuk dua responden lainnya tidak menjawab pertanyaan terkait omset dari peneliti.

Aspek Manajemen

Pelaku usaha banyak menceritakan bahwa omset yang didapat tidak selalu merata bahkan dua anggota kelompok yaitu Fitriyani dan Supriyani yang tidak mendapatkan omset dalam satu bulan dikarenakan kurangnya tenaga pemasaran. Hal tersebut pun diakui oleh beberapa anggota lainnya sehingga dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pelaku usaha terkendala dari segi pemasaran. Hasil tersebut juga terlihat dari meningkatnya omset yang dirasakan pelaku usaha yang diakibatkan oleh pameran batik. Bahkan dari hasil pameran ada yang mendapat omset sebesar Rp. 70.000.000,-. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa batik yang diproduksi memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, namun terkendala dari segi pemasaran. Selain itu kurangnya penggunaan SOP dalam usaha menjadi suatu problematika lebih lanjut.

Manfaat dari SOP salah satunya adalah pemberian tugas dan tanggungjawab. Misalnya ada pekerja yang bertanggungjawab terhadap target penjualan dan lain sebagainya. Pemisahan tugas dan tanggungjawab tersebut dapat memberikan kejelasan dalam bekerja sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Namun berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa rata-rata pelaku usaha belum menerapkan SOP dalam bisnisnya. SOP tersebut belum diterapkan mulai dari produksi, administratif hingga pemasaran.

Dampak dari kurangnya penggunaan SOP dari bisnis dapat tercermin dari kurangnya pemasaran yang dilakukan. Kurangnya pemasaran menimbulkan dampak buruk terhadap perusahaan hingga tidak mampu menjual batik dalam satu bulan penuh. Adapun SOP yang diterapkan oleh rata-rata pelaku usaha tidak tertulis hanya sebatas pengawasan dalam produksi saja sehingga berimplikasi pada gagal produksi karena hasil produksi yang tidak sesuai. Dapat disimpulkan kurangnya SOP juga mempengaruhi terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Selain dari berbagai kendala dan problematika yang dijelaskan, rata-rata pelaku usaha terkendala dari segi permodalan. Sulitnya mendapat pembiayaan berpengaruh terhadap proses produksi hingga sulitnya dalam meningkatkan omset.

Aspek Keuangan

Aspek keuangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan SAK EMKM terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam “Kelompok Usaha Bersama Batik Pringmas”. Berdasarkan hasil kuisioner yang didapat kami menemukan bahwa rata-rata pelaku usaha belum membuat laporan

keuangan dengan baik bahkan beberapa pelaku usaha belum sama sekali membuat laporan keuangan. Hal tersebut terkendala karena pengetahuan dan SDM yang kurang memadai. Walaupun ada beberapa pelaku usaha yang telah melaksanakan kegiatan akuntansi namun itu belum cukup.

Kegiatan akuntansi yang dilaksanakan hanya sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran serta membuat laporan laba-rugi sederhana tanpa menghitung HPP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan SAK EMKM dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari tidak membuat laporan keuangan neraca yang memberikan informasi terkait posisi keuangan, selain itu tidak adanya pemisahan harta serta hasil usaha memperumit keadaan. Melihat karakteristik kriteria UMKM yang rata-rata berada di skala mikro tentu hal tersebut merupakan hal yang biasa mengingat salah satu karakteristik usaha mikro adalah kurangnya SDM memadai terlebih akuntansi merupakan suatu kegiatan yang syarat akan keahlian.

Problematika yang mungkin dapat ditimbulkan dari tidak adanya pemisahan penghasilan dan harta pribadi dengan usaha dapat menyebabkan tidak tersedianya informasi posisi perusahaan dengan baik. Bahkan dilapangan terkadang ada pelaku usaha yang tidak mampu mengontrol hutang yang menyebabkan kepailitan suatu usaha. Jika ditarik dari seluruh penelitian yang telah diikuti seharusnya pelaku usaha telah mendapatkan pemahaman terkait aspek keuangan dengan baik, terlebih beberapa pelatihan telah diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan tersebut namun jika Kembali kepada karakteristik, nyatanya untuk membuat laporan keuangan memang sulit terlebih karena kendala SDM yang kurang dan tidak memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan kami menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang tergabung dalam KUB Pringmas belum menerapkan manajemen dan keuangan dengan baik. Selain itu permasalahan terkait pemodal dan teknis lainnya seperti pemasaran menjadi problematika lebih lanjut. Namun pelaku usaha yang tergabung memiliki keahlian yang cukup memadai dalam produksi batik sehingga itu dapat menunjang terhadap kelanjutan bisnisnya.

Pelaku UMKM yang terdata kebanyakan berada di skala mikro, berdasarkan kriteria tersebut sejalan dengan karakteristik usaha mikro yang mengalami berbagai kendala khususnya kurangnya jumlah dan kemampuan SDM. Kelanjutan dalam kendala tersebut berimplikasi pada kegiatan akuntansi yang tidak dijalankan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari tidak tersedianya laporan keuangan yang dapat menunjang informasi terhadap masing-masing pelaku usaha.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu melakukan penelitian dengan metode observasi yang mendalam sehingga mendapatkan hasil yang lebih lengkap terkait mengapa problematika tersebut dapat terjadi. Pemerintah dapat melakukan pendampingan secara intensif serta membantu pelaku usaha dalam akses permodalan yang mudah.

REFERENSI

- Arnina, P. (2016). *Langkah - Langkah Efektif Menyusun SOP*. Huta Publisher. https://books.google.co.id/books/about/Langkah_Langkah_Efektif_Menyusun_SOP.html?id=xhoDgAAQBAJ&redir_esc=y
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Remaja Rosdakarya, 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7251&lokasi=lokal>
- Kemendparekraf. (2022). *Statistik Ekonomi Kreatif 2020*. <https://kemendparekraf.go.id/publikasi-statistik-ekonomi-kreatif/statistik-ekonomi-kreatif-2020>
- Putra, Adhitya. (2022). Kumparan.com. Adithya Putra, "OJK Ungkap 3 Masalah UMKM: Sulit Akses Pasar hingga Terjerat Rentenir", 23 Mei 2022. <https://m-kumparan-com.cdn.appoject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/ojk-ungkap-3-masalah-umkm-sulit-akses-pasar-hingga-terjerat-rentenir> Diakses pada 27 April 2023
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Sariagri.id. (2021). *Batik Sebagai Identitas Bangsa Menjadi Tumpuan Ekonomi UMKM*. Wwww.Sariagri.Id. <https://sariagri.id/article/amp/80676/batik-sebagai-identitas-bangsa-menjadi-tumpuan-ekonomi-umkm> diakses pada 28 Maret 2023
- Sidik, Heri. (2023). Ekspor batik Indonesia semester I Sumbang devisa capai 27.42 juta dollar AS. www.jogja.antaranews.com <https://jogja.antaranews.com/amp/berita/579065/ekspor-batik-indonesia-semester-i-seumbang-devisa-2742-juta-dolar-as>. Diakses pada 25 Maret 2023
- Taufiqoh, B. R., Nurdevi, I., & Khotimah, K. (2018). Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia. *Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra*, 58–65. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA/article/view/2220>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- UU RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*.